



Analisis Konflik Sosial Dekanat Dan Mahasiswa Dalam Kebijakan Kegiatan Diklat Mahasiswa (Studi Kasus Di Fakultas Agama Islam Uika Bogor)

Husna Amalia Jakaria¹, Rofiah²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 9 September, 2023

Revised 12 September, 2023

Accepted 16 September, 2023

Kata Kunci:

Pendidikan
Konflik Sosial
Strukturalisme Konflik

Keywords:

Education
Social conflict
Conflict Structuralism

ABSTRAK

Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No. 20 tahun 2003 menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik, termasuk aspek spiritual, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan. Konflik dapat muncul jika latar belakang budaya beragam. Teori strukturalisme konflik oleh Ralf Dahendorf mempertimbangkan aspek ketidaksetaraan sosial, konflik, dan peran kekuasaan dalam masyarakat modern. Konflik dalam konteks sosial dapat terjadi akibat perbedaan pandangan atau kepentingan yang berbeda. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan perspektif teori strukturalisme konflik oleh Ralf Dahendorf. Fokus utama penelitian untuk memahami konflik sosial yang muncul sehubungan dengan perubahan kebijakan terkait dengan kegiatan rutin mahasiswa, termasuk penyebab, kronologi, resolusi, dan aspek lainnya yang terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik sosial yang timbul sebagai akibat dari perubahan kebijakan dalam pelaksanaan diklat mahasiswa. Hasil penelitian ini yaitu mahasiswa merasa tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan ini dan merasa terkekang oleh peraturan Lembaga Pendidikan. Konflik ini mencerminkan perbedaan otoritas dan kekuasaan antara Dekanat dan mahasiswa dalam struktur sosial kampus. Dekanat memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki, sehingga kebijakan baru dapat diterapkan tanpa persetujuan mahasiswa.

ABSTRACT

Legislation concerning the Education System No. 20 of 2003 emphasizes the importance of education in developing students' potential, including spiritual aspects, self-knowledge, personality, intelligence, noble morals and necessary skills. Conflicts can arise if cultural backgrounds are diverse. The conflict structuralism theory by Ralf Dahendorf considers aspects of social inequality, conflict, and the role of power in modern society. Conflict in a social context can occur due to differences in views or different interests. This research adopts a qualitative method approach using the perspective of conflict structuralism theory by Ralf Dahendorf. The main focus of research is to understand social conflicts that arise in connection with policy changes related to students' routine activities, including causes, chronology, resolution, and other related aspects. The aim of this research is to identify and analyze social conflicts that arise as a result of policy changes in the implementation of student training. The results of this research are that students feel they are not included in this decision making and feel constrained by the regulations of the educational institution. This conflict reflects differences in authority and power between the Dean and students in the campus social structure. The dean has a higher position in the hierarchy, so new policies can be implemented without student approval.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Husna Amalia Jakaria
Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun
Bogor, Indonesia
Email: husnaamalia2812@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No. 20 tahun 2003, dikatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dari dirinya dan masyarakat[1]. Selain itu, pendidikan sebagai salah satu upaya untuk membangun sumberdaya manusia, memerlukan wawasan yang sangat luas. Pendidikan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam pemikiran maupun pengalamannya. Adapun Perguruan Tinggi merupakan organisasi yang unik dan kompleks. Kondisi tersebut terletak pada integrasi atau disintegrasi kultur penyelenggara kegiatan akademik. Jika penyelenggara akademik memiliki latar budaya yang sama maka kemungkinan integrasi akan lebih besar. Namun jika penyelenggara kegiatan akademik memiliki latar budaya yang beragam, maka kampus akan tercerai-berai secara kultural [2]. Maka dari itu, pimpinan perguruan tinggi harus bisa memberi kebijakan, memahami mahasiswa, menguasai peranan dalam organisasi sehingga dapat terciptanya hubungan baik dalam organisasi tersebut.

Teori strukturalisme konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahendorf ialah teori dengan pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya ketidaksetaraan sosial, konflik, dan peran kekuasaan dalam masyarakat modern[3]. Konflik merupakan sebuah proses sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat, karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan yang menimbulkan jurang pemisah atau gap antara pihak-pihak yang bertikai [4]. Konflik juga dapat diartikan dengan situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok atau organisasi atau sikap mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam oposisi, bukan Kerjasama [5]. Pada perspektif negatif, konflik dipandang sebagai peristiwa yang perlu dihindari karena dapat mengurangi efisiensi dalam kelompok atau organisasi [6]. Konflik bisa terjadi karena ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta hingga ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan lain sebagainya [7].

Dalam permasalahan sosial antara Dekan dan mahasiswa, teori ini dapat membantu dalam menganalisis konflik yang mungkin timbul, misalnya perbedaan harapan, kekuasaan yang tidak seimbang, atau ketidakadilan dalam penilaian. Dengan memahami akar konflik, akan ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi perbedaan tersebut. Hal ini terjadi karena setiap kelompok memiliki kepentingan dan arahnya masing-masing sehingga kunci dari teori

konflik adalah kepentingan. Teori konflik kontemporer tidak hanya melihat konflik yang bersifat destruktif, namun juga menganalisis fungsi konflik yang bersifat konstruktif bagi masyarakat[8].

Berkaitan dengan teori tersebut, Pimpinan perguruan tinggi dituntut untuk mampu menyelesaikan konflik secara dewasa, matang, dan profesional sehingga lembaga pendidikan yang dipimpinnya tidak terkena dampak negatif dari konflik yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Fakultas Agama Islam UIKA Bogor, terdapat perbedaan argumentasi antar pihak fakultas (Dekanat) dengan mahasiswanya. Hal ini menyebabkan konflik yang didalamnya terdapat pro dan kontra. Kasus ini menyangkut kegiatan diklat rutin tahunan mahasiswa, yang dimana adanya ketidaksetujuan dari pihak mahasiswa terhadap hal ini. Tentu hal ini bisa terjadi karena konflik tercipta dengan adanya kepentingan yang berbeda, sehingga menciptakan sebuah perubahan pada masyarakat. Perubahan dapat terwujud melalui kondisi positif dan negatif hingga radikalisme pada struktur sosial. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam [9].

Puncaknya, bibit-bibit perselisihan itu benar-benar berubah menjadi sebuah konflik. Hal ini harus dapat diselesaikan dengan benar agar tidak merugikan antar pihak yang bersangkutan. Untuk terciptanya lingkungan pendidikan yang damai, perlunya kontribusi antar pihak internal dan mahasiswanya agar dapat bekerjasama dalam menumbuhkan suasana nyaman. Maka dari itu, artikel ini membahas terkait penyelesaian masalah sosial tersebut dikorelasikan dengan teori strukturalisme konflik. Serta artikel ini membahas terkait bagaimana hubungan yang baik dalam dunia pendidikan. Solusi untuk mengurangi terjadinya konflik sosial antara pihak internal pendidikan dengan mahasiswanya. Artikel ini juga menunjukkan pentingnya hubungan baik dalam pendidikan demi menjaga kualitas dan kuantitas yang mendidik serta yang dididiknya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan perspektif teori strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf. Fokus penelitiannya ialah melihat konflik sosial yang terjadi dalam perubahan kebijakan kegiatan rutin mahasiswa. Mulai dari penyebab terjadinya konflik, kronologi, resolusi, dan lain-lain. Tujuannya ialah untuk mengetahui dan mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi ketika keluarnya kebijakan baru terkait diklat mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme konflik dari Dahrendorf. Dahrendorf melihat ketundukan masyarakat terhadap perubahan, dan menekankan pertikaian dan konflik dalam sistem sosial serta melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang disintergrasi dan perubahan. Dahrendorf beranggapan bahwa masyarakat memiliki dua sisi yakni konsensus dan konflik. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan dengan tekanan.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Agama Islam, UIKA Bogor. Dengan subjek penelitiannya merupakan Dekanat dan mahasiswa. Metode dalam menentukan subjek penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling ialah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini sebagai

contoh, orang tersebut yang dianggap tahu tentang fenomena konflik yang terjadi, ataupun dia sebagai penguasanya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi, pengamatan, wawancara secara mendalam (in-depth interview) dengan pihak Dekanat dan mahasiswa. Data yang telah diperoleh peneliti dikumpulkan menjadi satu kemudian dianalisis menggunakan teori strukturalisme konflik. Lalu proses penelitian dengan menggunakan 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi[10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Konflik

Dekanat menjadi salah satu peran penting dalam mengawasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan akademik dan administratif terkait dengan fakultas, jurusan, serta mahasiswanya. Adapun DEMA FAI UIKA menjadi tempat berproses regenerasi kepemimpinan. Beberapa mahasiswa memiliki minat untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi ini beberapa diantaranya untuk lebih membangun kemampuan dirinya dalam organisasi dan menambah pengalaman dalam berorganisasi. Adanya perbedaan pendapat dapat menjadikan faktor penyebab dari terjadinya konflik dikalangan suatu organisasi dan Lembaga. Mahasiswa membutuhkan eksistensi untuk menunjang karirnya didunia organisasi seperti politik, termasuk salah satunya politik kampus. Eksistensi mahasiswa didalam kampus itu membantu mahasiswa yang lainnya untuk membangun jaringan sosialisasi yang lebih luas lagi, bisa juga ke arah atas kepada kedudukan tinggi di kampus atau fakultas.

Dahrendorf mengatakan bahwasanya ada sebuah pembagian otoritas yang tak merata, sehingga ini yang membuat terjadinya konflik didalam sebuah Lembaga. Otoritas ini mencakup kebijakan dan wewenang. Sehingga dalam kasus masalah sosial ini terdapat dua kelompok yang dikuasai. Kelompok yang berkuasa merupakan kelompok yang memiliki otoritas tinggi dalam mengatur jalannya sistematika fakultas, sedangkan kelompok yang dikuasai adalah kelompok yang tidak sepenuhnya dapat meninjau otoritas tersebut. Otoritas Dekanat menjadi kunci konflik dalam fenomena ini. Sebab otoritas tersebut seakan membuat Ormawa tidak diikutsertakan dalam sosialisasi perubahan kebijakan peraturan tersebut. Konflik sosial yang terjadi disini ialah dikarenakan adanya perubahan kebijakan secara lisan terkait kegiatan diklat tahunan mahasiswa yang diubah dimana awalnya tempat dilaksanakan kegiatan tersebut diperbolehkan seperti di villa, penginapan, dan tempat lainnya. Namun, Dekanat membuat kebijakan baru dengan menjadi diharuskan tempat dilaksanakannya di pondok pesantren atau Lembaga Pendidikan tanpa adanya tahap sosialisasi dengan Ormawa terlebih dahulu. karena sebagai anggota struktur sosial di kampus dan fakultas, Dekanat dan Ormawa memiliki mitra sejajar yang seharusnya ketika pihak Dekanat membuat kebijakan terkait mahasiswa maka dapat melibatkan Ormawa, karena Ormawa adalah bentuk perwakilan suara dari mahasiswa.

Pada 14 Mei, DEMA dan Ormawa FAI menyampaikan sikap atas isu terkait adanya intervensi kegiatan diklat diluar Fakultas Agama Islam oleh pihak Dekanat yang dapat menyebabkan keresahan antar mahasiswa/i dan dapat menimbulkan mundurnya nalar berpikir dan berkembangnya mahasiswa/i. DEMA dan Ormawa FAI akhirnya sepakat untuk menuntut dan memberikan surat terbuka kepada Dekan, Wadek 3, dan menolak tegas kegiatan diklat yang dilaksanakan di pondok pesantren atau Lembaga Pendidikan. Konflik vertikal ini terjadi dikarenakan yang terlibat dalam konflik ini merupakan Dekanat, DEMA, serta Ormawa

fakultas. Maka ada sedikit perbedaan dalam status sosialnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Dekanat dan Ormawa memiliki mitra yang sejajar dimana memiliki beberapa hak dan kewajiban yang setara.

3.2. Pemaparan Pendapat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek yang telah ditentukan dengan 4 persoalan yang disampaikan, terdapat hasil sebagai berikut :

1. Perubahan kebijakan,
2. Efektifitas Kegiatan,
3. Pelanggaran dan ketidaksetujuan,
4. Hal yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Dekanat :

1. Alasan Dekanat mengubah kebijakan kegiatan diklat mahasiswa menjadi di Lembaga Pendidikan dikarenakan hal itu agar mahasiswa dapat terpantau, dapat menjalin silaturahmi dan hubungan dengan pemilik Lembaga Pendidikan, serta menghindari hal-hal buruk yang berpeluang terjadi.
2. Kegiatan diklat di Lembaga Pendidikan dianggap lebih efektif dari segi tempat, keberlangsungan acara, serta kegiatan ibadahnya. Serta, di Lembaga Pendidikan yang pemiliknya memiliki relasi dengan kita akan lebih mudah dijangkau.
3. Ketika ada yang melanggar atau tidak setuju dengan perubahan ini, dirasa wajar jika ada yang tidak setuju dikarenakan setiap perubahan itu mesti diusahakan terlebih dahulu, mereka tidak setuju karena mereka dari sebelumnya sudah terbiasa dengan kebiasaan yang dilakukan mahasiswa yang lebih dulu. Sesuai pengamatan Dekanat sejauh ini, jika kegiatan diklat dilakukan di tempat seperti villa, kurang efektif dan kurang menaungi mahasiswa secara penuh. Dari segi ekonomi, kalau di pondok pesantren dana yang kita serahkan bisa menjadi dana kegiatan keagamaan, kita dapat ikut mengembangkan dan membangun Lembaga tersebut, serta dapat menjadi infaq dan amal jariyah kelak.
4. Dekanat tidak setuju dengan dilaksanakannya kegiatan diklat diluar Lembaga Pendidikan, karena beberapa hal yang dapat memicu hal-hal yang melenceng dari ajaran islam. Dekanat juga memiliki kewajiban penuh atas seluruh mahasiswanya, semua yang terjadi pada mahasiswa maka Dekanat memiliki tanggung jawab atas itu semua. Maka dari itu, Dekanat terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya, dengan terus berdakwah melalui kekuasaan, lisan, dan sikap.

Sesuai pemaparan pendapat Dekanat atas permasalahan itu, dapat disimpulkan menjadi 3 hal; mengubah kegiatan diklat menjadi di Lembaga Pendidikan sebagai langkah dakwah, menjalin silaturahmi dan hubungan dengan Lembaga Pendidikan serta pemiliknya, dan tanggung jawab moral serta kepemimpinan.

Mahasiswa :

1. Perubahan kebijakan ini langsung disampaikan tanpa adanya keikutsertaan Ormawa yang notabene sebagai perwakilan mahasiswa untuk bersuara dan memiliki otoritas yang sejajar dengan Dekanat dalam struktur sosial di kampus. Jadi, mahasiswa terutama Ormawa

merasa tidak diikutsertakan dalam perubahan kebijakan kegiatan yang menyangkut mahasiswa itu.

2. Mahasiswa merasa dengan diubahnya kegiatan ini akan terasa lebih terkekang dengan peraturan Lembaga Pendidikan yang ditentukan, merasa tidak leluasa seperti halnya seperti di villa.
3. Mahasiswa tidak setuju dengan perubahan kebijakan tersebut yang mengakibatkan konflik ini terjadi. Secara vertikal, mahasiswa hanya dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pihak atasnya.
4. Karena ketidaksetujuan tersebut, akhirnya Ormawa FAI menyampaikan sikap dan isu adanya intervensi terkait hal itu. Dilakukannya demo terhadap Dekanat dan menolak tegas kegiatan diklat yang akan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan.

Sesuai pemaparan pendapat mahasiswa atas permasalahan itu, dapat disimpulkan menjadi 3 hal; perubahan kebijakan tanpa diikutsertakan Ormawa fakultas, merasa terkekang dengan peraturan Lembaga Pendidikan, tidak setuju dan melakukan penyampaian seperti demo atas penolakan tegas terhadap perubahan kebijakan tersebut.

3.3. Korelasi Masalah Dengan Teori

1. Konflik dalam struktur sosial: konflik antara Dekanat dan mahasiswa ini adalah permasalahan yang mungkin terjadi di setiap kampus atau Lembaga Pendidikan tinggi, karena adanya perbedaan pendapat antara pihak ordinar dan sub-ordinar yang menyebabkan konflik.
2. Distribusi Kekuasaan: Perbedaan pendapat dan ketidaksetaraan tingkat sosial Dekanat dan mahasiswa membuat konflik ini terjadi. Kekuasaan yang dimiliki Dekanat lebih tinggi dalam struktur sosial, menjadikan mahasiswa kalah suara dan berakhir mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Dekanat.
3. Lapisan Sosial dan Ketidaksetaraan: Kekuasaan dan otoritas yang dimiliki Dekanat dianggap menjadi pemicu awal adanya konflik perbedaan ini, perubahan kebijakan yang tidak mengikutsertakan Ormawa.
4. Struktur Konflik Bersifat Dinamis: Walaupun mahasiswa tidak setuju dengan perubahan kebijakan yang dilakukan Dekanat, namun Dekanat memiliki niat dan tujuan yang dapat memicu mahasiswanya untuk mengalami perubahan menjadi lebih baik.
5. Fungsi Konflik: Dampak positif dalam perubahan kebijakan ini ialah membuat mahasiswa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan menjadikan kegiatannya lebih efektif.

Dalam keseluruhan, terdapat pro dan kontra antara pendapat Dekanat dan mahasiswa ketika dikorelasikan dengan teori strukturalisme konflik. Sebagaimana teori strukturalisme konflik yang mengedepankan otoritas yang berkuasa diantara dua kelompok yang terjadi konflik, maka Dekanat berhak lebih untuk menetapkan dan melanjutkan Tindakan perubahan kebijakan itu sampai kegiatannya diberlangsungkan. Walaupun di satu sisi terdapat ketidaksetujuan atas perubahan itu, otoritas Dekanat tetap tidak bisa dirubah posisinya, namun hanya cara menetapkan kebijakan barunya yang sedikit terjadi kesalahan sehingga membuat mahasiswa geger dan merasa tidak diikutsertakan.

Dalam konteks ini, teori strukturalisme konflik dapat memberikan pemahaman yang berguna dalam menganalisis dan mengatasi konflik yang terjadi antara Dekanat dan mahasiswa.

Konflik tersebut melibatkan perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan sosial, perbedaan otoritas, dan kekuasaan

4. KESIMPULAN

Konflik sosial adalah fenomena yang biasa terjadi dalam masyarakat, dan dalam konteks ini, terjadi antara pihak Dekanat sebagai otoritas fakultas dan mahasiswa sebagai kelompok yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Perubahan kebijakan diklat mahasiswa menjadi di Lembaga Pendidikan menyebabkan konflik antara Dekanat dan mahasiswa. Mahasiswa merasa tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan ini dan merasa terkekang oleh peraturan Lembaga Pendidikan. Konflik ini mencerminkan perbedaan otoritas dan kekuasaan antara Dekanat dan mahasiswa dalam struktur sosial kampus. Dekanat memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki, sehingga kebijakan baru dapat diterapkan tanpa persetujuan mahasiswa.

Meskipun terjadi konflik, penting untuk dicatat bahwa konflik sosial tidak selalu negatif. Dalam hal ini, konflik tersebut memicu perubahan kebijakan yang mungkin menguntungkan mahasiswa dalam jangka panjang. Artikel ini menunjukkan bahwa teori strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf dapat digunakan sebagai kerangka kerja yang berguna dalam memahami dan mengatasi konflik sosial dalam konteks pendidikan tinggi. Konflik adalah bagian alami dari masyarakat, dan pemahaman yang baik tentang akar konflik dapat membantu dalam menemukan solusi yang memadai.

REFERENSI

- [1] Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, vol. 4, no.6, pp. 1707–1715. 2022
- [2] Dzulkifli, M., & Harianto, S. Mahasiswa Dan Kekuasaan (Konflik Sosial Pada Pemilihan Umum Raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya 2013 Sampai 2015) , *Paradigma*, vol.5, no.1,pp 0–216. Jan 2017.
- [3] Ritzer, George. Teori Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012.
- [4] Rahmat, M. Ensiklopedia Konflik Sosial. Tangerang: Loka Aksara. 2019
- [5] Ramadani, F. E., & Harianto, S. Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. *Paradigma*, vol. 11. no. 1, pp.1–34, jun 2022.
- [6] Puspita, W. Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan. Deepublish. 2018.
- [7] Wahyudi, A. Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, vol. 8, no. 1, pp.1–15, Apr 2020, doi: 10.36563/publiciana.v8i1.45
- [8] M. Taufiq Rahman, Pengantar Filsafat Sosial, Bandung: Lekkas, 2018.
- [9] Basid, A. Konflik Sosial Dalam Novel Mei Hwa Dan Sang Pelintas Zaman Karya Afifah Afra Berdasarkan Prespektif Ralf Dahrendorf. *Jurnal Pena Indonesia*, vol. 4, no.1, pp 51–66. Mar 2018, doi: 10.26740/jpi.v4n1.p51%20-%2066
- [10] Bado, B. Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*. 2021.